

BAB II

TATA KELOLA INDUSTRI TIONGKOK, HUAYOU COBALT DAN REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Arus globalisasi membawa perubahan besar bagi kemajuan teknologi dunia serta berdampak pada perubahan dalam penggunaan energi alternatif. Hal ini mendorong banyak negara untuk bersaing menjadi yang terbaik dalam hal pengetahuan dan pengelolaan energi alternatif. Tiongkok sebagai representasi pemilik modal memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan investasi ke negara-negara berkembang yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi Tiongkok. Republik Demokratik Kongo menjadi negara dengan sumber daya mineral kobalt yang menjadi incaran para banyak negara karena komoditi ini memiliki permintaan yang tinggi melihat kebutuhan akan baterai tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Bab ini menjelaskan negara Republik Demokratik Kongo baik pada segi sosial, ekonomi dan politik yang bergantung pada investasi yang diberikan oleh Tiongkok berupa bantuan dana dan pengembangan sektor tambang melalui perusahaan Huayou Cobalt dengan anak perusahaannya yaitu Congo Dongfang Mining yang ada di Kongo sebagai bagian dari kerjasama Tiongkok dan Kongo, serta tata kelola perusahaan yang ada di negara Tiongkok.

2.1 Tata Kelola Industri Perekonomian di Tiongkok

Tata kelola perusahaan di Tiongkok telah muncul dan berkembang seiring dengan pergeseran Tiongkok dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. Sebelum mengalami perusahaan sistem ekonomi, sebagian besar perusahaan Tiongkok adalah milik negara, ekonomi terencana ini juga dapat disebut sebagai ekonomi komunis, dan negara berperan dalam mengendalikan seluruh perusahaan dan negara juga bertanggung jawab menentukan barang yang harus diproduksi, gaji pekerja dan harga barang. Dengan demikian sistem ekonomi terencana ini mengedepankan negara sebagai penggerak ekonominya. Berbeda dengan ekonomi pasar, sistem ini lebih mengutamakan desentralisasi ke perusahaan- perusahaan dan konsumen,

sehingga nantinya mereka akan menjadi aktor utama dalam menentukan jenis, jumlah dan harga barang berdasarkan pada penawaran dan permintaan (Xu, 2011).

Perubahan orientasi ekonomi Tiongkok berusaha menyatukan perencanaan ekonomi Tiongkok melalui kebijakan industri, sehingga perusahaan apapun akan dapat melakukan investasi ke luar negeri demi mewujudkan tujuan mereka agar dapat memasarkan dan bersaing di dunia internasional. Perindustrian Tiongkok dibagi menjadi 3 yaitu perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan kepemilikan campuran, dan swasta domestik. Perusahaan milik negara merupakan perusahaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah serta tujuannya didasarkan pada kebutuhan pemerintah. Perusahaan kepemilikan campuran merupakan perusahaan yang dimiliki sebagian oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang. Terakhir perusahaan swasta dimiliki oleh non pemerintah atau dimiliki oleh pemegang saham yang tidak lebih dari 50 orang atau perseroan terbatas (Fulin, 2011).

Reformasi ekonomi menyebabkan Tiongkok berusaha untuk menerapkan makroekonomi dan menjadikan perekonomian Tiongkok lebih terbuka. Dana investasi luar negeri diperbolehkan masuk meskipun secara terbatas. Hal ini mendorong BUMN yang semula beroperasi dengan mengandalkan anggaran pemerintah menjadi lebih mandiri. Pemerintah pusat juga mulai memberikan kebebasan bagi BUMN untuk berinvestasi. Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga mulai ditingkatkan dalam pengambilan kebijakan lokal daerah. Ekonomi sosialisme Tiongkok memfokuskan pada keterbukaan pasar melalui dukungan sektor industri yang berdasar pada inovasi teknologi, dan sistem keuangan modern (Bremmer, 2009).

Tiongkok menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Pembangunan ekonomi masa depan Tiongkok menjadi fokus utama negara tersebut mengingat persaingan pasar domestik di antara perusahaan-perusahaan yang semakin ketat, sehingga membuat perusahaan-perusahaan melakukan terobosan demi memaksimalkan sumber daya mereka yaitu dengan masuk ke pasar internasional. Ambisi ini terdengar oleh Pemerintah Tiongkok,

sehingga pada tahun 2000, Pemerintah Tiongkok pertama kali menyusun Strategi *Go Global* untuk perusahaan-perusahaan di Tiongkok, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Tiongkok ini berusaha penuh untuk mendukung semangat dari perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan gerakan mereka ke pasar internasional. *Go Global* menyediakan kerangka kerja untuk memandu perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menemukan sumber daya dan pasar mereka di luar negeri, inisiatif ini menjadi kebijakan yang strategis mengingat banyaknya perusahaan yang ingin mencari pasar mereka di dunia internasional, kesempatan ini dapat menjadi pondasi dalam membangun ekonomi masa depan di Tiongkok (Matthew, 2009).

Proyek kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Tiongkok untuk mengajak perusahaannya melakukan investasi di luar negeri. Bersama *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT) telah menjelaskan mengenai skema kebijakan tersebut sebagai langkah untuk membantu perusahaan Tiongkok dalam mengembangkan strategi mereka dan memanfaatkan peluang di pasar internasional. Kebijakan tersebut berdampak positif bagi ekonomi Tiongkok, minat perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi luar negeri pun mengalami peningkatan. Pada proyek ini Pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang tepat bagi investasi keluar, sehingga prospek perusahaan-perusahaan Tiongkok akan positif (Dotson, 2019).

Strategi investasi keluar akan diintegrasikan dengan upaya berkelanjutan untuk mendorong masuknya modal asing untuk meningkatkan keterlibatan Tiongkok secara keseluruhan dalam kerja sama ekonomi global. Proyek investasi Tiongkok di luar negeri mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan, eksplorasi sumber daya alam, pemrosesan industri, transportasi, kontrak layanan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, dan pertanian. Pemerintah Tiongkok berharap perusahaan-perusahaan ini mampu masuk ke pasar global untuk mengamankan ruang yang lebih luas untuk penyesuaian struktural dan alokasi sumber daya yang

optimal demi mewujudkan tujuan Tiongkok dimasa yang akan datang (Dunning, 1993).

Kegiatan ini dilakukan demi integrasi Tiongkok ke dalam ekonomi global, dan Tiongkok bergabung ke *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, yang berdampak pada pertumbuhan dan transformasi Tiongkok dalam ekonomi berbasis pasar modern. Penandatanganan aturan perdagangan multilateral China tidak hanya mengantarkan periode pertumbuhan tinggi di China, tetapi juga menguntungkan ekonomi global. Terlebih program- program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok memiliki tujuan untuk meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Asing Langsung Tiongkok, meningkatkan tingkat dan kualitas proyek, dan memperluas jaringan perusahaan Tiongkok di pasar internasional. Usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa investasi asing langsung China meningkat dari US\$3 miliar pada tahun 1991 menjadi US\$35 miliar pada tahun 2003 (Huang, 2002).

Pertumbuhan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terbilang lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat, dan Eropa pada tahap awal perkembangannya, sehingga dapat dikatakan bahwa gebrakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok merupakan langkah yang jenius. Beberapa perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar negeri berusaha untuk mengamankan akses ke sumber daya alam. Energi dan logam adalah bidang investasi utama dan menyumbang hampir 70% dari total arus keluar sejak tahun 2005. Perusahaan manufaktur Tiongkok telah berinvestasi di tiga sektor utama: otomotif, teknologi, dan pengiriman. Inisiatif ini memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk membangun keterampilan baru dan memperbanyak kekuatan bisnis mereka, untuk mengembangkan produk baru, meningkatkan pemasaran mereka, dan mempelajari bentuk manajemen baru. Salah satu dampak terbesar dari adanya investasi yang dilakukan oleh Tiongkok berada di benua Afrika. Total investasi asing di benua itu telah mendekati \$51 miliar per tahun sejak 2007 (Lelyveld, 2020).

Secara proporsional dengan ukuran ekonomi, investasi langsung Tiongkok di Afrika telah lima kali lebih besar daripada di seluruh dunia. Sebagian besar

investasi di benua Afrika difokuskan pada mineral, bahan mentah, dan infrastruktur. Diperkirakan *Export Import China Bank* (EXIM) atau Bank Ekspor-Import Tiongkok telah meminjamkan sekitar \$67 milyar sekitar tahun 2000 ke Afrika Sub-Sahara dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Selain itu, China sedang membangun enam zona kerja sama ekonomi dan perdagangan di beberapa negara di wilayah benua Afrika. Dampak investasi China terlihat dalam hal penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan harga yang lebih rendah untuk banyak barang (OECD, 2016).

Keberhasilan pertumbuhan dan ekspansi asing perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok berakar pada ekonomi dunia dan ekonomi nasional. Perubahan penting dalam perekonomian dunia mencakup tiga proses globalisasi, regionalisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Kondisi yang menguntungkan diciptakan untuk semua perusahaan yang kuat dan cukup kompetitif untuk memperluas pasar serta mampu menciptakan pengetahuan bisnis, teknologi dan inovasi baru, dan cukup pintar untuk memanfaatkan perubahan institusi ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri.

Namun, untuk memanfaatkan kondisi yang menguntungkan di lingkungan eksternal, pada awalnya perusahaan-perusahaan Tiongkok harus tumbuh dan belajar bersaing di pasar sebagai basis kegiatan ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok telah mampu mengubah, tumbuh dan menyesuaikan diri dengan pasar global sebagai hasil dari transisi bertahap berorientasi pasar yang telah diterapkan dalam perekonomian nasional selama lebih dari 30 tahun (Feng & Wang, 2010).

Perusahaan milik negara Tiongkok memiliki posisi yang lebih baik dimata pemerintahan, terlihat dari banyaknya kebijakan yang berpihak pada perusahaan milik negara seperti akses kredit yang mudah, pemberian subsidi, dan jaminan pinjaman. Kondisi ini berdampak pada perusahaan swasta dan menekan mereka untuk mencari pasar ke luar negeri. Dengan terobosan tersebut malah memberikan dampak positif bagi perusahaan swasta, dan berdampak juga ke pemerintahan

Tiongkok yang mendapatkan peningkatan pendapatan ekonomi mereka melalui perusahaan swasta yang bermain di luar negeri.

Pada dasarnya, perusahaan swasta tidak mendapatkan keistimewaan dalam hal kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan Tiongkok, namun mengingat tujuan dari Tiongkok demi mendominasi ekonomi dunia. Maka dengan meningkatnya perusahaan swasta yang melakukan investasi di luar negeri, Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Global* demi mempermudah akses perusahaan Tiongkok mendapatkan pasarnya di luar negeri. Beberapa cara dilakukan seperti menggunakan penggabungan usaha atau *joint venture* antara perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta Tiongkok (Nangoi, 2022).

Tata kelola perusahaan menjadi fokus pemerintah Tiongkok dalam memajukan ekonomi internasionalnya, mereka terus berbenah mengenai tata kelola sehingga menciptakan iklim yang baik bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tata kelola perusahaan di Tiongkok muncul dan berkembang seiring dengan pergeseran Tiongkok dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar, sehingga kerangka kerja tata kelola perusahaan yang lebih baik perlu dibentuk. Pada awal dicetuskannya tata kelola perusahaan, segala kegiatan perusahaan diatur oleh pemerintah dan pemangku kepentingan perusahaan tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan arah perusahaan. Pengembangan tata kelola perusahaan Tiongkok telah berproses selama 30 tahun yang dapat dibagi menjadi 4 fase (Taylor, 2022).

Pertama perusahaan di Tiongkok didominasi oleh perusahaan milik negara dan diatur sepenuhnya oleh negara, sehingga pada tahun 1978 Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok merevitalisasi perusahaan milik negara menjadi perusahaan yang lebih efisien dengan restrukturisasi sistem perusahaan lama dengan menerapkan sistem perusahaan modern. Kedua menciptakan sistem tanggung jawab manajemen perusahaan dengan merubah bentuk ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Ketiga, mengadopsi dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pemerintah Tiongkok mengubah mekanisme pengelolaan perusahaan milik negara dan membangun

sistem perusahaan modern yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi pasar, dengan kepemilikan, hak dan tanggung jawab yang jelas, dan menampilkan pemisahan pemerintahan dari perusahaan dan manajemen ilmiah (OECD, 2014).

Tiongkok membuat keputusan untuk mendefinisikan sistem ekonomi dasarnya sebagai sistem di mana kepemilikan negara adalah fitur utama, dengan perkembangan umum dari beragam bentuk kepemilikan. Sejalan dengan definisi ini, upaya dilakukan di dua bidang. Pertama, reformasi BUMN dan penyesuaian struktural perekonomian nasional dipercepat menuju arah pembangunan sistem di mana badan usaha menjadi badan hukum yang bertanggung jawab atas operasi bisnisnya sendiri, profitabilitas, pengembangan, disiplin diri, dan portofolio risiko sebagai pelaku pasar nyata. Beberapa perusahaan milik negara direstrukturisasi menjadi perseroan terbatas atau perseroan terbatas. Dengan penyusunan anggaran dasar, rapat pemegang saham, dewan direksi, dan dewan pengawas didirikan, dan manajemen senior ditunjuk, kerangka dasar untuk struktur tata kelola perusahaan telah terbentuk. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok saat ini dapat melakukan kegiatan mereka seiring dengan tata kelola yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Terlebih adanya kebijakan *Go Global* yang dikeluarkan pemerintah memberikan jalan bagi perusahaan swasta yang mampu bersaing di luar negeri untuk menanamkan investasi mereka di wilayah-wilayah strategis demi menunjang kepentingan Tiongkok dalam ekonomi global (Cheung & Qian, 2009).

2.2 Negara Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Tengah dengan sumber daya alam yang melimpah baik dari segi fauna, flora hingga hasil bumi yang amat sangat kaya. Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang memiliki batas langsung dengan negara-negara tetangganya. Pada bagian utara Republik Demokratik Kongo berbatasan langsung dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan; Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur; Zambia dan Angola di selatan; dan Republik Kongo di Barat. Republik Demokratik Kongo memiliki luas pantai yang terbilang kecil, luas sekitar 1 km di tepi utara muara sungai Kongo. Pantai tersebut terletak di kota Banana di

wilayah barat negara Republik Demokratik Kongo sekaligus menjadi salah satu kota pelabuhan yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo (Britanica, 2021).

Gambar 2. 1

Peta Negara Republik Demokratik Kongo



Sumber: (Encyclopedia Britannica. Inc, 2021)

Negara Republik Demokratik Kongo memiliki wilayah yang luas bagi sebuah negara di benua Afrika, menjadikan Republik Demokratik Kongo sebagai negara terbesar ke-2 di benua Afrika setelah Aljazair dan ke-12 di dunia dengan luas wilayah 2.344.858km persegi. Kekayaan alam Kongo juga tak sebatas sumber daya abiotik. Hewan dan tumbuhan yang begitu beragam pun hidup di negara ini. Meskipun negara tersebut merupakan negara di Afrika yang kebanyakan faunanya adalah binatang savanna, Kongo memiliki satwa endemik yang hanya ada di wilayah tersebut salah satunya yaitu (Okapia Johnstoni) atau Okapi¹. Selain memiliki fauna endemik, Republik Demokratik Kongo dilalui oleh Sungai Kongo

¹ Okapia Johnstoni atau Okapi merupakan mamalia yang menyerupai kuda dan bercorak zebra yang hanya ada di Republik Demokratik Kongo

atau dikenal juga dengan Sungai Zaire. Sungai ini menghubungkan negara-negara seperti Kongo, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Angola, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Zambia, Tanzania dan Gabon. Sungai Kongo merupakan salah satu sungai terbesar di Afrika dengan panjang 4.700 km yang menjadikannya sebagai sungai kedua terbesar setelah Sungai Nil (Eduard, 2020).

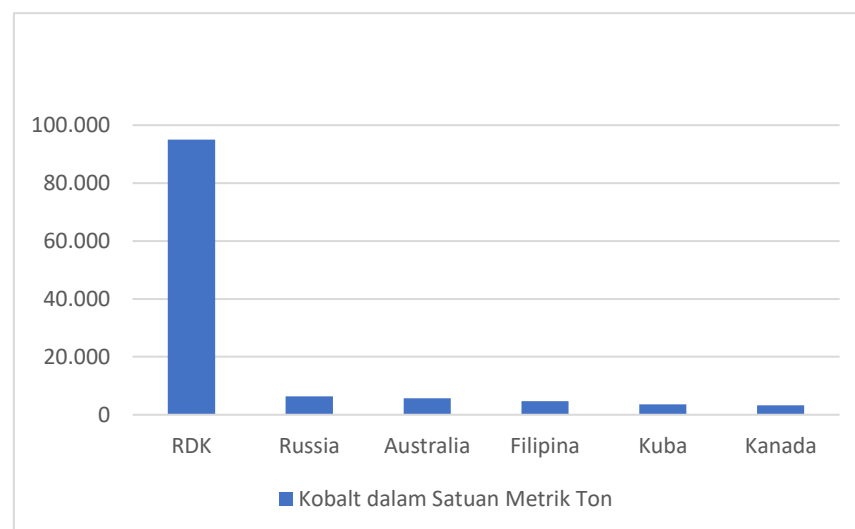
Besarnya potensi sumber daya alam yang ada, berdampak pada mata pencaharian warga negara Republik Demokratik Kongo. Masyarakat Republik Demokratik Kongo memiliki sumber penghasilan yang didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Salah satunya yaitu Sungai Kongo yang memiliki peran penting bagi masyarakat Republik Demokratik Kongo sebagai jalur transportasi, sumber makanan dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Republik Demokratik Kongo. Selain sungai sebagai tempat bergantung masyarakat Republik Demokratik Kongo, hutan merupakan salah satu dari kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut. Setidaknya 40 juta masyarakat Republik Demokratik Kongo masih bergantung pada hutan sebagai tempat perlindungan, kesehatan, makanan, kelangsungan budaya dan spiritual (Draper, 2015).

Selain Sungai Kongo dan Hutan yang mengelilingi negara tersebut. Terdapat cadangan mineral yang menempatkan Republik Demokratik Kongo sebagai negara yang berpotensi menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia yaitu kobalt. Hampir dari dua per tiga cadangan kobalt dunia berada di Republik Demokratik Kongo. Selain kobalt, terdapat logam mulia yang dihasilkan oleh pertambangan di Republik Demokratik Kongo seperti emas, koltan, bahkan berlian dan cadangan mineral menjadi salah satu yang dicari oleh masyarakat Republik Demokratik Kongo. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah yang kaya akan cadangan mineral seperti Katanga beralih profesi menjadi pencari cadangan mineral. Hasil pertambangan negara tersebut terbilang tinggi yang menjadikan sektor pertambangan menjadi sumber daya ekonomi utama negara tersebut (Jerman, 2021).

Republik Demokratik Kongo baru-baru ini dihebohkan dengan “gunung emas” yang berada di wilayah Kivu Selatan. Penemuan ini tentu menimbulkan kekacauan di wilayah tersebut, banyak masyarakat lokal memperebutkan wilayah dan berusaha untuk mengakui bahwa daerah yang telah mereka duduki merupakan properti pribadi mereka. Setidaknya sekitar 90 persen tanah di wilayah Kivu Selatan tersebut mengandung emas, maka dari itu dengan tingginya persentase emas yang ada di wilayah tersebut yang membuat wilayah tersebut dijuluki sebagai “gunung emas”. Namun dengan munculnya “gunung emas” tersebut tidak serta merta menempatkan Republik Demokratik Kongo sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia. Bahkan Kongo sendiri tidak masuk ke dalam sepuluh besar pengekspor emas dunia (CNN, 2021).

Grafik 2. 1

Data Negara Penghasil Kobalt Terbesar di Dunia



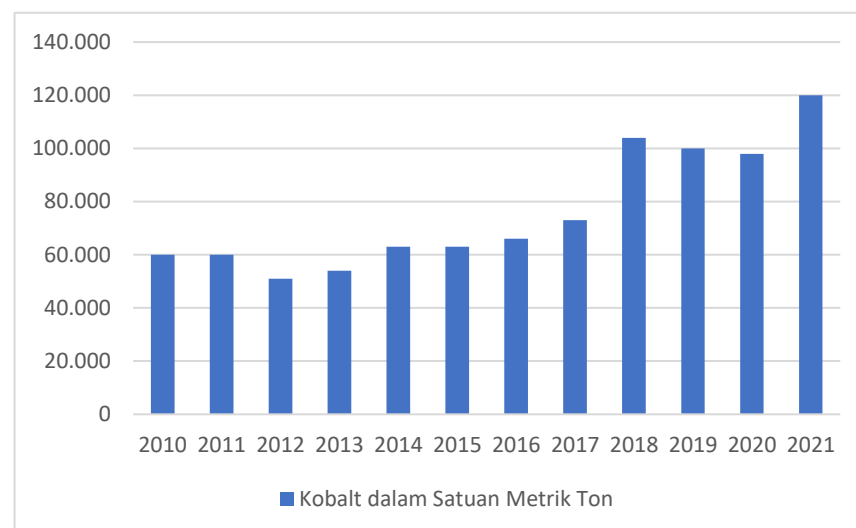
Sumber: (Databoks, 2021)

Dari **Grafik 2.1** di atas dapat dilihat bahwa, produksi kobalt Republik Demokratik Kongo sebesar 95.000 metrik ton, Russia sebesar 6.300 metrik ton, Australia 5.700 metrik ton, Filipina 4.700 metrik ton, Kuba 3.600 metrik ton, dan Kanada 3.200 metrik ton. Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa Kongo merupakan negara dengan penghasil kobalt terbesar di dunia.

Emas bukanlah komoditi utama melainkan Berlian yang menjadi salah satu komoditi yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo. Cadangan berlian yang dimiliki oleh Kongo diperkirakan sekitar 150 juta karat atau setara dengan 33 ton, cadangan tersebut menempatkan Kongo sebagai negara dengan cadangan berlian terbanyak kedua setelah Rusia. Kongo memiliki setidaknya 15% dari total cadangan berlian dunia saat ini (CNBC, 2021). Dengan kekayaan alam tersebut, Kongo berpotensi menjadi salah satu negara terkaya dunia hanya dengan mengandalkan cadangan berlian serta cadangan kobalt yang ada di negara tersebut.

Grafik 2. 2

Produksi Kobalt Republik Demokratik Kongo dari tahun 2010-2021



Sumber: (Statistica, 2022)

Dari **Grafik 2.2** diatas dapat dilihat bahwa, produksi kobalt di Kongo cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010- 2011 sebesar 60.000 metrik ton, tahun 2012 sebesar 51.000 metrik ton, tahun 2013 sebesar 54.000 metrik ton, tahun 2014-2015 sebesar 63.000 metrik ton, tahun 2016 sebesar 66.000 metrik ton, tahun 2017 sebesar 73.000 metrik ton, tahun 2018 sebesar 104.000, tahun 2019 sebesar 100.000, tahun 2020 sebesar 98.000, dan tahun 2021 sebesar 120.000.

Kobalt merupakan salah satu cadangan mineral yang ada di Republik Demokratik Kongo dan menjadi salah satu komoditi utama negara tersebut. Kobalt

sendiri dikenal sebagai bahan baku utama pembuatan baterai pada *smartphone* yaitu baterai *lithium-ion*. Karakteristik kobalt yang tahan panas dan karat, serta dapat menyimpan daya lebih lama. Hal inilah yang membuat cadangan mineral tersebut memiliki nilai lebih bagi perusahaan-perusahaan teknologi maupun otomotif. Kekayaan alam terhadap cadangan mineral ini jugalah yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Dengan bermodalkan alat seadanya, masyarakat yang tinggal di wilayah tambang mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit cadangan mineral yang ada di wilayah tersebut.

Republik Demokratik Kongo tidak lepas dari kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pada tahun 1870, Raja Leopold II mengirimkan utusannya yaitu Sir Henry Morton Stanley untuk melakukan eksplorasi ke negara yang berpotensi memiliki kekayaan alam yang melimpah dan dapat menghasilkan keuntungan bagi Raja Leopold II. Sir Henry Morton Stanley merupakan seorang penjelajah terkenal asal Inggris yang telah melakukan penjelajahan di benua Afrika. Dengan berbekal pengalamannya tersebut, Stanley merekomendasikan negara Republik Demokratik Kongo sebagai negara yang berpotensi dapat memperkaya Raja Leopold II. Pada akhirnya, di tahun 1885 Republik Demokratik Kongo resmi menjadi properti pribadi Raja Leopold melalui Konferensi Berlin dan menamai negara tersebut dengan *The Congo Free State* (Pakenham, 1991).

Demi memperkaya dirinya, Raja Leopold II melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya mineral, kebun karet dan gading sebagai sumber penghasilannya. Bahkan tindak kekerasan terhadap penduduk sekitar sering terjadi, lantaran Raja Leopold II memiliki target terhadap komoditi karet sehingga para pekerja karet dipaksa untuk dapat bekerja sesuai dengan keinginan Raja Leopold II untuk memenuhi target yang diinginkannya. Pada akhirnya penduduk sekitar harus tunduk terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Raja Leopold II, agar terhindar dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara pribadi Raja Leopold II. Namun pada tahun 1908, penindasan yang dilakukan oleh Raja Leopold II diketahui oleh dunia internasional dan menekan Raja Leopold II untuk melepas kepemilikan pribadinya terhadap Kongo kepada pemerintahan Belgia. Dengan berakhirnya Kongo sebagai

negara yang dimiliki oleh Raja Leopold II, pemerintahan Belgia secara resmi merubah nama *The Congo Free State* menjadi *Belgian Congo* (Britannica, 2021).

Setelah melalui masa kelam tersebut, *Belgian Congo* secara resmi mendapatkan kemerdekaannya pada 30 Juni 1960 dari Belgia dan merubah namanya menjadi Republik Kongo. Pemerintahan perlahan-lahan mulai dibentuk dengan menetapkan Joseph Kasavubu sebagai presiden Republik Demokratik Kongo. Namun tidak lama setelah penetapan kepala negara, pada 5 September 1960 terjadi perselisihan antara kedua pemangku kepentingan tersebut yang berdampak pada krisis nasional di Republik Kongo. Di saat inilah, kepala angkatan bersenjata Kongo (*Armee Nationale Congolaise (ANC)*) yaitu Jenderal Joseph Mobutu melakukan kudeta kepada presiden Joseph Kasavubu dengan dukungan dari dunia barat (Britannica, 2022).

Joseph Mobutu menentang adanya pemerintahan komunis dan menolak adanya ideologi tersebut di wilayah Afrika. Setelah berhasil memenangkan kudeta tersebut, Joseph Mobutu segera melaksanakan sistem satu partai dengan dia sebagai presidennya. Dengan demikian, Joseph Mobutu secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Kongo. Di masa kepemimpinan Presiden Joseph Mobutu, Republik Kongo secara resmi dirubah namanya menjadi Republik Zaire. Zaire sendiri diambil dari kata “Zair” yang berarti “sungai besar” dalam bahasa Afrika (Dungia, 1993).

Selama masa pemerintahannya, Presiden Joseph Mobutu dikenal sebagai orang yang cerdas dalam mempertahankan kekuasaannya. Dengan dalih memerangi ancaman komunisme yang mungkin saja masuk ke wilayah tersebut dan dengan dukungan dari Amerika Serikat. Presiden Mobutu dapat mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun lamanya. Hal ini tentu saja dibarengi dengan beberapa praktek seperti tidak adanya ruang terhadap demokrasi di negara tersebut dan beberapa kali sempat terlibat adanya pelanggaran hak asasi manusia di Republik Demokratik Kongo. Tidak adanya demokrasi di negara tersebut, menciptakan iklim politik yang tidak sehat dan otoriter. Hal tersebut diperparah dengan Presiden Mobutu yang berusaha untuk memperkaya diri padahal negara

sedang dimasa keterpurukan ekonomi. Melihat sikap Presiden Mobutu yang hanya mementingkan diri sendiri memunculkan istilah bagi negara Zaire yang dikenal sebagai *bandit state* (Bering, 2011).

Adanya rezim tersebut membuat masyarakat Zaire tidak tinggal diam. Pada tahun 1990 terjadi ketegangan antara masyarakat Zaire dengan Presiden Joseph Mobutu dimana mereka berusaha melakukan penggulingan terhadap kekuasaan Presiden Joseph Mobutu. Semakin intens desakan dari masyarakat inilah yang membuat Presiden Mobutu menyadari bahwa dalam melanggengkan kekuasaannya, ia harus dapat mengontrol masyarakat dengan mengindahkan dan menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Melihat kondisi negara yang kian hari tidak kunjung membaik, masyarakat Zaire merasa tergerak dan mengirimkan tuntutan kepada presiden yang tidak lain adalah ingin mengembalikan negara tercinta mereka ke sistem multi partai. Dengan sistem multi partai inilah mereka berharap dapat meningkatkan kondisi ekonomi negara mereka. Lalu pada tahun 1991, melalui desakan yang cukup intens selama satu tahun. Presiden Joseph Mobutu dengan maksud ingin melanggengkan kekuasaannya pada akhirnya bersedia mengganti sistem pemerintahan yang awalnya merupakan partai tunggal, kini menjadi sistem multi partai (Hall, 1974).

Setelah diresmikannya sistem multi partai tersebut, Etienne Tshikedi ditunjuk menjadi perdana menteri baru negara Zaire yang juga seorang pemimpin dari partai oposisi yaitu Partai Serikat Demokrasi Sosial Progresif. Munculnya Tshikedi sebagai perdana menteri dengan latar belakang partai yang berlawanan dengan Presiden Mobutu memunculkan harapan terhadap masyarakat demi negara Zaire yang stabil. Namun, dalam upaya Tshikedi membentuk kabinet baru mendapatkan campur tangan dari Presiden Mobutu. Hal ini berdampak buruk dan pada akhirnya memicu adanya kerusuhan. Sadar campur tangannya akan memberikan efek negatif, akhirnya mengalah dan lebih kooperatif.

Namun seperti tidak memiliki efek jera, Presiden Joseph Mobutu meminta jatah separuh dari total kursi kabinet negara tersebut. Dengan begitu, maka mayoritas kabinet akan berada di bawah pengawasan Presiden Mobutu. Tentu saja

hal ini ditolak oleh Tshikedi yang sekarang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pada akhirnya berujung pada tuntutan masyarakat terhadap Presiden Mobutu terkait keputusan pemilihan Tshikedi sebagai perdana menteri dengan segala wewenangnya. Akhirnya melalui tuntutan tersebut, Presiden Mobutu membentuk Kongres Rakyat "*Soverign National Conference*". Lalu pada tahun 1992, "*Soverign National Conference*" memilih Tshikedi sebagai perdana menteri baru dengan segala wewenangnya. Masyarakat sangat percaya dengan Tshikedi karena ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Mobutu (Smith, 1997).

Hadirnya Tshikedi sebagai perdana menteri baru memberikan harapan kepada masyarakat yang menginginkan Presiden Mobutu segera di lengserkan dan dibawa ke pengadilan. Namun hal tersebut tidak kunjung terlaksana, bahkan masyarakat masih merasa kesulitan untuk menggulingkan rezim Mobutu. Hal ini dapat terjadi karena Tshikedi yang tadinya pro terhadap rakyat kini menjadi sosok yang anti rakyat dengan mengakui dan mendukung sistem pemerintahan pada masa Presiden Mobutu. Karena merasa telah dikhianati, masyarakat lantas membawa gerakan rakyat Zaire ke tahap yang baru dimana mereka berusaha meningkatkan kualitas perlawanan dan berusaha menghancurkan rezim Mobutu secara menyeluruh.

Peristiwa tersebut memunculkan sosok baru yang sejalan dengan pandangan masyarakat yang ingin menggulingkan rezim Presiden Mobutu yakni Joseph Kabila. Dengan terjadinya penggulingan tersebut, pada akhirnya menghantarkan Joseph Kabila menjadi seorang Presiden di tahun 1998. Negara yang tadinya bernama Zaire kini telah dipulihkan kembali menjadi Republik Demokratik Kongo. Terpilihnya Kabila menjadi presiden menunjukkan simbol kemenangan rakyat Republik Demokratik Kongo yang selama ini dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter selama lebih dari 32 tahun lamanya (Simpson, 2007).

Republik Demokratik Kongo memiliki beberapa kelompok etnis dan suku yang beragam. Seperti kebanyakan negara yang ada di wilayah Afrika, Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara yang memiliki konflik internal yang

meliputi etnis maupun pemerintahan. Daerah timur Republik Demokratik Kongo menjadi wilayah yang paling sering terdapat konflik. Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo merupakan konflik domestik yang melibatkan perang antar etnis yang berdampak pada infrastruktur dan perekonomian negara tersebut. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir, persaingan etnis yang terjadi di Republik Demokratik Kongo telah menjatuhkan jutaan korban jiwa. Konflik antar etnis terjadi akibat dari adanya perebutan sumber wilayah yang kaya akan mineral, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak yang menginginkan kekuasaan atas sumber daya tersebut. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Kongo mengalami penderitaan yang memicu perpindahan massal masyarakat ke berbagai negara di sekitar Kongo demi mencari perlindungan dan kehidupan yang layak (Kisangani, 2003).

Pada sektor pembangunan sosial dan ekonomi, Republik Demokratik Kongo memiliki tingkat pembangunan yang relatif rendah. Dimana pada tahun 1998, negara tersebut memiliki rata-rata usia harapan hidup 45 tahun, lalu pada tahun 2011 hanya diangka 48 tahun. Angka tersebut terbilang kecil, karena pada tahun 2009 rata-rata angka harapan hidup dunia tercatat sebesar 66 tahun untuk laki-laki dan 68 tahun untuk perempuan. Hal ini menunjukkan lambatnya pertumbuhan harapan hidup yang ada di negara Republik Demokratik Kongo (BBC, 2017). Pada sektor kesehatan, Republik Demokratik Kongo masih sangat minim akan fasilitas penunjang seperti rumah sakit yang bagus serta para tenaga kesehatan yang terhitung sedikit.

Pada sektor ekonomi, terdapat delapan puluh persen masyarakat negara Republik Demokratik Kongo merupakan golongan kebawah dan berada pada garis kemiskinan, adanya konflik berkepanjangan membuat pertumbuhan negara tersebut terhambat, serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Pertambangan masih menjadi lumbung utama penopang perekonomian yang ada di negara tersebut. Dengan sumber daya yang melimpah tersebut, bila konflik domestik dapat dihilangkan maka akan membawa Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara terkaya di dunia (Ford et al, 2003).

Kondisi domestik tersebut diperparah dengan pemerintahan Republik Demokratik Kongo yang otoriter. Setelah lepas dari genggaman Belgia pada tahun 1960, Kongo dipimpin oleh Mobutu selama 32 tahun. Rezim Mobutu dinilai gagal dalam membangun pertumbuhan ekonomi Republik Demokratik Kongo, yang disebabkan karena tindakannya yang berusaha mengumpulkan kekayaan demi kepentingan pribadi. Dengan begitu, Kongo mengalami kemunduran infrastruktur dan berdampak pada kesengsaraan terdapat negara itu sendiri. Dengan kondisi negara yang tidak stabil mengakibatkan perang domestik dan banyaknya korupsi yang terjadi hingga saat ini.

Tercatat lebih dari dua konflik domestik terjadi melibatkan antar suku maupun milisi dan pemerintahan. Maka dari itu, perlindungan terhadap masyarakat Kongo kian hari kian surut mengingat seringnya konflik yang terjadi di negara tersebut. Pada akhirnya, milisi bersenjata menjadi tak terkendali dan meneror warga sekitar. Dalam mencari penghasilan, para penambang diteror oleh milisi bersenjata dengan meminta imbalan hasil tambang mereka, bila hal tersebut tidak terpenuhi para milisi akan melakukan teror, mencuri, memperkosa bahkan membunuh warga. Para wanita korban pemerkosaan milisi di Kongo timur dipaksa bekerja untuk menambang emas, koltan, dan timah dalam status sebagai budak (Watch, 2002).

2.3 Perusahaan Transnasional Huayou Cobalt

Globalisasi memberikan dampak terhadap naiknya angka penggunaan *smartphone* yang berdampak pula pada tingginya permintaan kobalt sebagai bahan utama pembuatan baterai *lithium-ion* pada *smartphone* dari statistik **Grafik 2.3**. *Smartphone* merupakan produk nirkabel dengan baterai sebagai sumber dayanya. Seiring berkembangnya teknologi, *smartphone* hadir dengan pilihan jenis baterai yang beragam. Salah satu jenis baterai yang sering dijumpai pada *smartphone* terbaru adalah *lithium-ion battery* atau biasa dikenal sebagai *Li-ion battery*. Baterai jenis ini sering digunakan dalam *smartphone* dikarenakan memiliki kepadatan yang tinggi, tahan lama serta aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang (Liputan6, 2020). Kobalt dikenal sebagai bahan baku pembuatan baterai yang tahan panas serta dapat menyimpan daya lebih lama, hal ini menjadikan kobalt sebagai

bahan baku utama dalam pembuatan baterai *lithium-ion*. Penggunaan kobalt sebagai baterai dapat ditemukan di berbagai jenis *smartphones*, tablet, laptop dan kendaraan berbahan bakar listrik dan segala jenis benda yang menggunakan baterai sebagai tenaganya.

Ada beberapa perusahaan tambang terbesar di Tiongkok, diantaranya adalah *China Shenhua Energy Co., Ltd*, *China Coal Energy Co., Ltd.*, *Zijin Mining Group Co., Ltd.*, *China Northern Rare Earth Group High- Tech Co., Ltd.* *Jiangxi Copper Co., Ltd.* *Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co., Ltd.*, *China Molybdenum Co., Ltd.*, *Shandong Gold Mining Co., Ltd.*, *Yanzhou Coal Co., Ltd*, serta *Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.* (PwC, 2020). Namun dari semua perusahaan tersebut hanya Huayou Cobalt perusahaan yang berfokus pada penyulingan sumber daya mineral kobalt dan bergerak pada pembuatan bahan baterai *Lithium Ion* berbahan dasar kobalt, sehingga Huayou Cobalt di dirikan di Republik Demokratik Kongo (Olson, 2021).

Huayou Cobalt merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh Weitong Xie dan Xuehua Chen pada tahun 2002, yang bergerak pada bidang penyuplai bahan baku pembuatan baterai *lithium-ion* yaitu kobalt. Huayou Cobalt menjadi salah satu perusahaan transnasional asal Tiongkok yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dengan total aset sekitar USD 3.5 milyar pada rentang tahun 2013-2019. Dengan pencapaiannya tersebut, Huayou Cobalt mendapatkan penghargaan karena telah berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Tiongkok di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Huayou Cobalt mengalami beberapa perubahan terkait nama dan kepemilikan perusahaan tersebut. Pada awal didirikan, perusahaan yang berfokus pada kobalt ini bernama ‘Zhejiang Huayou Cobalt-Nickel Material Co., Ltd’ (Chen, 2018).

Secara regional, Tiongkok merupakan konsumen kobalt terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat, membutuhkan sekitar 32% dari konsumsi global pada tahun 2020 disusul oleh Eropa di peringkat kedua sekitar 23% dan Amerika

Serikat di peringkat 3 sekitar 18%. Cadangan sumber daya kobalt global sekitar 7,1 juta ton, seperti yang diungkapkan oleh data dari USGS (Globalnewswires, 2022).

Namun pada tahun 2008, perusahaan tersebut berganti nama menjadi ‘Zhenjiang Huayou Cobalt Co., Ltd’ atau biasa dikenal sebagai Huayou Cobalt dan melakukan perubahan dengan membagi dua kepemilikan saham melalui dua perusahaan swasta Tiongkok yaitu Dashan (dimiliki oleh Mr. Weitong Xie) dan Huayou Investment (dimiliki oleh Mr. Xuehua Chen). Melalui Dashan dan Huayou Investment, Weitong Xie dan Xuehua Chen telah menjadi pengendali bersama Huayou Cobalt dan pada 29 Januari 2015 perusahaan ini menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai (Chen, 2021).

Grafik 2. 3

Peningkatan Pengguna Smartphone 2016-2021



Sumber: (Statistica, 2021)

Dapat dilihat pada **Grafik 2.3** terjadi kenaikan pada penggunaan *smartphone* tiap tahunnya dengan 2,5 juta pengguna pada tahun 2016, 2,7 juta pengguna pada tahun 2017, 2,9 juta pengguna pada tahun 2018, 3,2 juta pengguna pada tahun 2019, 3,5 juta pada tahun 2020, dan 3,8 juta pada tahun 2021.

Huayou Cobalt merupakan perusahaan yang berfokus pada sumber daya mineral dan bergerak dalam pengembangan, penelitian dan pembuatan bahan

baterai *lithium-ion* berbahan dasar kobalt. Huayou Cobalt memiliki tiga sektor bisnis yang beroperasi, pertama sektor bisnis energi baru. Pada sektor bisnis ini Huayou Cobalt bergerak dalam bidang penelitian, dan pengembangan serta melakukan produksi dan penjualan bahan produk pada baterai *lithium-ion*. Kedua yaitu *non-ferrous*², sektor bisnis ini memiliki fokus pada pemrosesan produk bahan baru terhadap sumber daya mineral *non-ferrous* yaitu kobalt dan nikel. Terakhir sektor bisnis sumber daya, sektor bisnis ini memiliki tugas dalam menyeleksi bahan mentah, pertambangan dan pengolahan utama terhadap logam *non-ferrous* seperti kobalt, nikel dan tembaga.

Sebagai perusahaan besar penyuplai kobalt, Huayou Cobalt telah mengirimkan kobalt mereka ke berbagai perusahaan besar seperti Apple Inc, Huawei dan Samsung. Lalu pada sektor otomotif, Huayou Cobalt mengirimkan kobalt ke perusahaan mobil seperti Volkswagen. Huayou Cobalt juga mendirikan anak perusahaan bernama Congo Dongfang International Mining (CDM) yang berada di Lubumbashi, Republik Demokratik Kongo. Anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Huayou Cobalt ini dibentuk sebagai pemurni bahan mentah dengan mengumpulkan dan sebagai sarana para penambang pribadi menjual dan mendistribusikan kobalt mereka, sedangkan Huayou Cobalt berperan dalam mengolah bahan kobalt untuk kebutuhan domestik Tiongkok dan Ekspor, sehingga perusahaan ini diharapkan mampu memenuhi persediaan kobalt yang ada dan didistribusikan ke perusahaan Huayou Cobalt untuk diolah kembali menjadi produk setengah jadi dan siap jadi. Maka dari itu, Congo Dongfang Mining dibentuk untuk mengamankan sumber daya mineral yang ada di Kongo dan juga merupakan usaha Huayou Cobalt dalam menciptakan rantai pasokan dari hulu ke hilir (Chen, 2021).

Dalam rantai pasokan kobalt yang dimiliki oleh Huayou Cobalt, mayoritas kobalt berasal dari para penambang lokal “*artisanal mines*” yang berada di Republik Demokratik Kongo. Setidaknya lebih dari setengah kebutuhan dunia akan

² *Non-ferrous* merupakan istilah untuk jenis logam yang tidak memiliki unsur besi atau Ferro (Fe) secara kimiawi.

kobalt berada di Kongo, dan 20% dari sumber kobalt tersebut dimiliki oleh para penambang lokal “*artisanal mines*” (Ipdefenseforum, 2021). Congo Dongfang International Mining (CDM) diisi oleh pekerja yang tidak hanya berasal dari Tiongkok dan pekerja asing saja melainkan terdapat pekerja lokal yang bekerja untuk Congo Dongfang International Mining (CDM) (Reuters, 2021). Berikut jumlah pekerja yang ada di *Congo Dongfang International Mining* (CDM) pada **tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Jumlah Karyawan Congo Dongfang Mining (CDM)

Jumlah Karyawan	Kebangsaan	Tipe Kontrak	Sumber
672	RD Kongo	Langsung	(ITIE-DRC)
67	Asing	Langsung	(ITIE-DRC)

Sumber: (Congomines.org, 2016)

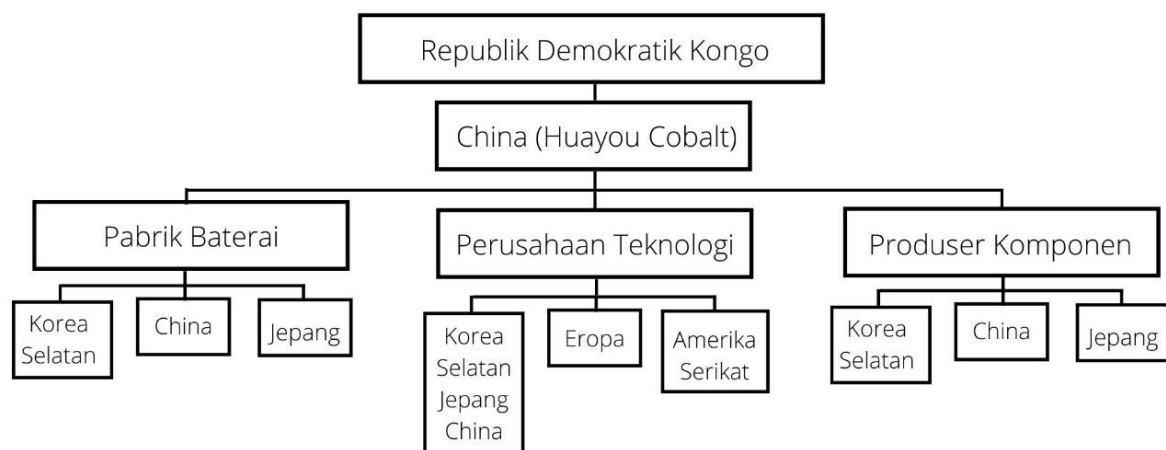
Pada **Tabel 2.1** dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di anak perusahaan Huayou Cobalt yaitu Congo Dongfang Mining 672 merupakan karyawan asli Kongo sedangkan 67 merupakan pekerja asing.

Pemilihan Republik Demokratik Kongo sebagai lokasi *Congo Dongfang International Mining* (CDM) tidak lain adalah agar rantai pasokan kobalt mudah terdistribusikan dari para penambang lokal “*artisanal mines*” ke perusahaan. Pada rantai pasokan kobalt dunia, Huayou memiliki peran sebagai “*choke point*”. Istilah tersebut muncul karena Huayou Cobalt yang memposisikan diri sebagai perusahaan yang menimbun, meleburkan dan memurnikan kobalt sangatlah penting bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kobalt sebagai komponen penting dalam produk mereka, dari **Gambar 2.2**.

Secara umum, peran yang dimiliki oleh Huayou Cobalt ini merupakan titik terbaik dalam mengawasi perjalanan kobalt dari lokasi tambang menuju ke perusahaan akhir. Seiring berjalannya waktu *Congo Dongfang International Mining* (CDM) tumbuh sebagai perusahaan dengan pertumbuhan yang sangat pesat.

Dimana sejak didirikan hingga tahun 2019, *Congo Dongfang International Mining* (CDM) memiliki nilai perusahaan sebesar 26.1 million USD pada Bursa Saham Shanghai 2020. Maka dari itu, *Congo Dongfang International Mining* (CDM) kini hadir sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pemurnian kobalt yang ada di wilayah tersebut. Dalam rantai suplai kobalt di pasar dunia, perusahaan Huayou Cobalt menjadi satu-satunya aktor yang memiliki peran “satu pintu” yaitu sebagai pengepul, memproses, dan mendistribusikan bahan mineral (kobalt) ke pasar global, dalam hal ini perusahaan tersebut memonopoli distribusi bahan mineral (kobalt) ke pasar global (Chen, 2021).

Gambar 2. 2
Distribusi Kobalt dari DRC ke seluruh dunia



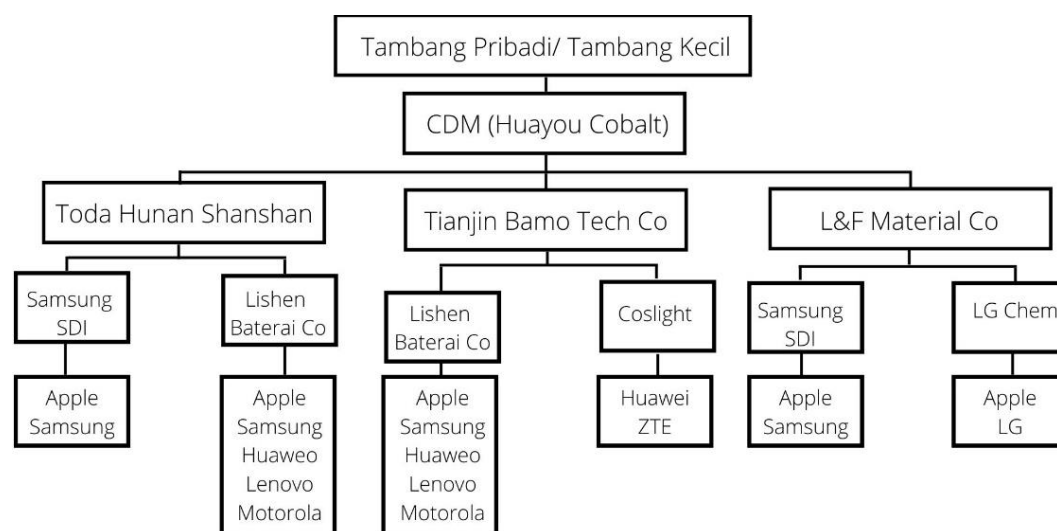
Sumber: (Amnesty International, 2016)

Dengan sistem tersebut menyebabkan tingginya pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan tersebut dari US \$ 10 milyar pada tahun 2010 menjadi US \$ 114 milyar pada tahun 2010. Huayou Cobalt memiliki berbagai cara dalam mendapatkan kobalt, salah satunya membeli hasil tambang dari masyarakat lokal. Setelah mendapatkan kobalt tersebut, Huayou Cobalt akan mendistribusikan kobalt ke anak perusahaannya yaitu *Congo Dongfang International Mining* (CDM). Setelah di proses di perusahaan tersebut, kobalt di distribusikan ke perusahaan pembuat komponen baterai yaitu Toda Hunan Shanshan New Materian Co, Tianjin Bamo Technology Co. dan L&F Material Co (International, 2017).

Dari ketiga perusahaan tersebut baru disalurkan ke perusahaan baterai seperti Samsung SDI, Tianjin Lishen Battery Co., Coslight dan LG Chem. Dari perusahaan inilah, baterai yang digunakan pada *smartphone* yaitu *lithium-ion* akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan besar industri telekomunikasi seperti Apple Inc, LG, dan Samsung, seperti pada **Gambar 2.3**

Gambar 2. 3

Bagan Distribusi Kobalt ke perusahaan



Sumber: (Tirto.id, 2016)

Sebagai perusahaan besar, pada tahun 2017 keuntungan yang diperoleh oleh Huayou Cobalt mencapai \$470.59M. Keuntungan yang sangat besar tersebut diperoleh Huayou Cobalt hanya dalam kurun waktu satu tahun, dimana pada tahun 2016 keuntungan perusahaan tersebut sebesar hanya \$106.7M (Asia Nikkei, 2017). Kenaikan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kobalt tiap tahunnya selalu naik. Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya tersebut, Huayou Cobalt melalui anak perusahaannya yaitu *Congo Dongfang International Mining* (CDM) akan menginvestasikan senilai \$147,2M dalam rangka memperluas eksplorasi aset pertambangan dan membangun proyek tembaga di Republik Demokratik Kongo. Hal ini dilakukan setelah Huayou Cobalt mengakuisisi hak mineral tembaga-kobalt milik *La Generale des Carrieres et des Mines* pada tahun 2015. Proyek tersebut berlokasi di wilayah Lukuni tepatnya di selatan Republik

Demokratik Kongo dan dari proyek ini diperkirakan akan menghasilkan setidaknya sekitar 30.000ton tembaga dalam satu tahun (Reuters, 2018).

Dari segi pekerja, Huayou Cobalt menjadi aktor non- negara yang mengatur undang- undang perburuhan transnasional, selain memang terdapat kepentingan ekonomi antara Tiongkok dengan Kongo. Huayou Cobalt menyoroti masalah perburuhan yang terjadi di pertambangan Kongo dengan menciptakan kembali norma- norma serta kebijakan yang mengatur mengenai pekerja tambang Kongo. Huayou Cobalt telah mulai aktif terlibat dengan inisiatif pengaturan tenaga kerja di tingkat internasional dan nasional. Keterlibatan yang ditingkatkan ini telah berkontribusi pada pembaruan peraturan di tingkat perusahaan, sehingga perusahaan ini menciptakan mekanisme baru terkait CSR yang ada di perusahaan dengan fokus pada tenaga kerja dan hak asasi manusia (Backer, 2008).

2.4 Korelasi antara Huayou Cobalt dan Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral. Kekayaan mineral yang dimiliki Kongo meliputi emas, berlian, kobalt, dan mineral lainnya. Kongo memiliki 60% cadangan kobalt dunia, hal ini sama dengan dua per tiga pasokan kobalt dunia berada di Kongo. Memiliki kekayaan mineral yang begitu besar (Indonesiawindow, 2021), justru malah menimbulkan banyak masalah terhadap negara tersebut. Konflik domestik yang tak kunjung berakhir menandakan bahwa negara tersebut dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Masyarakat selalu dirugikan bila konflik terjadi, terlebih para pekerja tambang yang ada di negara tersebut. Sebagai pekerja tambang, mereka dipekerjakan layaknya budak oleh para militan yang menguasai beberapa wilayah seperti Katanga. Demi memenuhi pasokan kobalt, para militan ini memanfaatkan para pekerja tambang yang ada di wilayah tersebut dengan cara mengancam dan tidak segan melakukan kekerasan.

Kondisi ini diperparah dengan pemerintahan yang tidak stabil. Setelah Kongo dikuasai oleh pemimpin yang otoriter selama 32 tahun, membawa Kongo menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sarana dan

infrastruktur tidak berjalan baik di negara tersebut, yang mengakibatkan masyarakat hidup di dalam keterpurukan. Adanya konflik berkepanjangan membuat pertumbuhan negara tersebut terhambat, dan mengakibatkan masyarakat Kongo berada pada garis kemiskinan.

Ditengah keterpurukan yang dialami Kongo, Huayou Cobalt hadir sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada sumber daya mineral yaitu kobalt. Perusahaan yang berbasis di Tiongkok ini lantas mendirikan anak perusahaan di negara Republik Demokratik Kongo dengan nama *Congo Dongfang International Mining* (CDM). Peran Huayou Cobalt sangat penting pada rantai pasokan kobalt dunia, dimana perusahaan ini memposisikan diri sebagai “*choke point*” yang memiliki tugas untuk mengelola, dan mengembangkan kobalt yang ada di Kongo. Posisi tersebut sangatlah strategis karena Huayou cobalt dapat mengawasi jalur kobalt masuk serta dapat mendistribusikan langsung ke perusahaan-perusahaan industri teknologi dan otomotif seperti Apple Inc, Samsung, LG dan Volkswagen.